

PERAN UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI BANGLADESH TAHUN 2007 – 2017

Saut Parlindungan Sitanggang¹
NIM. 1002045190

Abstract

Since 1971, poverty has become the main problem for Bangladesh. More than half of their citizens had to lived below the Poverty line ever since 1970s until 1990s. To helped Bangladesh overcome their Poverty Problem, The purpose of this study is to find out how UNDP's efforts in tackling the poverty problem in Bangladesh. This problem will be analyzed using the theory of poverty and the role of international organizations. UNDP established 3 Major Work Programs to assist Bangladesh's poverty concerns in 2007, namely Support Sustainable and Inclusive Planning, Urban Partnerships for Poverty Reduction and also National Social Protection Strategy. In addition to its own three programs, UNDP is also working with other International Organizations, including the Australian Agency for International Development (AUSAID) and the National Adaptation Plan Global Support Program (NAP-GSP)

Keyword: UNDP, Poverty in Bangladesh

Pendahuluan

Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di sebelah timur laut, Myanmar di tenggara dan Teluk Benggala di selatan. Bangladesh merupakan sebuah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan luas wilayah sebesar 144.000 kilometer persegi. Kondisi tanah di Bangladesh merupakan tanah subur sehingga 80% dari penduduk Bangladesh secara langsung atau tidak langsung menjadikan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski hanya mampu menyumbangkan 20% dari devisa negara, namun sebanyak 44% penduduk masih bekerja pada sektor pertanian.

Sejak merdeka pada tahun 1971, Bangladesh selalu berada dalam permasalahan kemiskinan. Menurut data dari United Development Programme (UNDP), peningkatan Gross Domestic Product (GDP) di Bangladesh berjalan sangat lambat bahkan setelah 3 dekade merdeka. Pada tahun 1990 GDP perkapita Bangladesh

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Horasbersaudara77@gmail.com

berada pada jumlah US\$1.068 dan 10 tahun setelahnya hanya meningkat menjadi US\$1.384. UNDP juga menghitung bahwa pertumbuhan penduduk di Bangladesh mencapai 2,7% pada tahun 1985. Dengan berdasarkan pada perhitungan melalui data dan informasi yang dimiliki oleh UNDP, Bangladesh dapat dikategorikan sebagai negara miskin atau termasuk negara dengan Human Development Index (HDI) yang rendah. Standar GNI dan GDP per kapita menurut UNDP adalah US\$ 5,368 dan US\$ 5,418. GNI dan GDP per kapita Bangladesh pada tahun 2010 hanya US\$ 2.337 dan US\$ 2.135, atau dibawah standar yang telah ditetapkan oleh UNDP. Data dari UNDP juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2013, sebanyak 49,46% dari total 156 juta jiwa penduduk Bangladesh berada dalam kemiskinan. (UNDP. UNDP Annual Report 2013 to 2014.)

Ada banyak faktor yang membuat Bangladesh berada dalam kemiskinan. Di antaranya adalah kondisi geografis dan cuaca yang tidak menguntungkan, situasi politik yang tidak kondusif serta minimnya fasilitas umum. Selain faktor geografis, permasalahan kepadatan penduduk serta kualitas sumber daya manusia (SDM) Bangladesh yang rendah membuat pertumbuhan perekonomian Bangladesh tidak maksimal. Jumlah penduduk Bangladesh telah mencapai angka hingga lebih dari 150 juta jiwa dan sekitar 50 juta jiwa penduduknya berada pada kategori miskin dan tidak ditunjang dengan fasilitas umum maupun fasilitas kesehatan yang memadai.

Situasi politik dan kinerja pemerintah Bangladesh yang tidak maksimal juga menjadi faktor berikutnya. Menurut Transparency International Bangladesh (TIB) Bangladesh berada di posisi ke 14 dari 175 negara sebagai negara yang paling korup di seluruh dunia. Selain persoalan korupsi, kerap kali terjadi konflik berkelanjutan antara dua partai utama di Bangladesh yakni partai Awami dan partai Nasional Bangladesh (BNP) yang seringkali mengganggu jalannya perekonomian masyarakat Bangladesh. Tingginya angka kemiskinan di Bangladesh berdampak kepada rendahnya tingkat kesejahteraan Bangladesh. Sebanyak 43% dari penduduk Bangladesh hanya memiliki tingkat pendapatan rumah tangga per hari sebesar \$1,25-\$2. Pendapatan rumah tangga yang berada di bawah standar UNDP ini memaksa anak-anak yang seharusnya bersekolah untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sekitar 4,7 juta anak-anak di Bangladesh yang berusia di bawah 14 tahun harus meninggalkan sekolahnya dan menjadi pekerja/buruh. Kemiskinan di Bangladesh juga menyebabkan maraknya praktik Perdagangan Manusia atau Human Trafficking. Data dari UNHCR menyebutkan bahwa pada tahun 2010 sampai 2012 saja terdapat 31.766 korban praktik Human Trafficking, dimana lebih dari 70% dari jumlah tersebut merupakan wanita dan anak-anak di bawah umur. (<http://www.economist.com/economist-explains/2015/02/economist> diakses 25 Agustus 2015)

Kondisi Bangladesh menarik simpati dari berbagai negara maupun organisasi internasional, salah satunya adalah United Nations Development Program (UNDP). Tahun 2000, UNDP memfokuskan pada masalah kemiskinan di Bangladesh dengan menerapkan Millenium Development Goals (MDGs). UNDP

menetapkan 8 MDGs dengan tiga program kerja utama untuk menangani kemiskinan, yakni Support Sustainable and Inclusive Planning (SSIP), Urban Partnerships for Poverty Reduction serta National Social Protection Strategy yang dimulai pada tahun 2007. Sejak UNDP menetapkan program MDGs pada tahun 2000 dan memfokuskan beberapa program kerja untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Bangladesh yang dimulai pada tahun 2007, kondisi perekonomian Bangladesh terus mengalami peningkatan. (www.un.org)

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Kemiskinan

Ensiklopedia internasional mendefinisikan kemiskinan sebagai tidak memiliki apa-apa atau pernyataan tentang orang yang tidak memiliki harta benda atau uang. Menurut ahli Jonathan Haughton dan Shahidur R. Kandker menjelaskan tentang kemiskinan sebagai istilah yang terkait dengan kesejahteraan. Pandangan konvensional menyatakan bahwa sejahtera pada dasarnya apabila semua kebutuhan hidup terpenuhi maka orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan minimum secara layak. Pandangan ini melihat kemiskinan dalam koridor keuangan. Kemiskinan juga bisa dilihat pada jenis yang lebih khusus, misalnya konsumsi, misalnya orang yang berhak mendapatkan rumah sederhana, raskin, atau jamkesmas.

Menurut Zastrow dan Ashman, kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya, yakni: (Jonathan Haughton dan Shahidur, 2009 hal 45)

- a. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang penyebabnya adalah Kemiskinan structural
struktur yang merugikan, baik struktur negara, pemerintahan, maupun sistem kemasyarakatan. Zastrow menyebutkan ada delapan penyebab kemiskinan, dan dua diantaranya adalah diskriminasi ras dan jenis kelamin dan ketidakmampuan untuk mengurus negara (mis-management resources). Berbagai sumber atau potensi karena salah urus akhirnya masyarakat menderita kemiskinan. Dua hal ini yang menyebabkan munculnya kemiskinan struktural: masyarakat tidak mampu menembus sekat-sekat aturan dan kepentingan yang mencengkeram mereka, sehingga terhalang dari pemenuhan kebutuhan hidup.
- b. Kemiskinan kultural (the culture of poverty)
Kemiskinan kultural atau budaya miskin adalah kemiskinan yang terjadi akibat dari berlakunya sistem kapitalisme. Munculnya budaya miskin disebabkan oleh dua sifat buruk kapitalisme. Yang pertama adalah banyaknya pengangguran akibat penggunaan teknologi tinggi dalam proses produksi sehingga memperkecil peran pekerja demi meraih biaya sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (cost-benefit analysis). Kedua, upah buruh yang rendah dikarenakan cost-benefit analysis mengutamakan analisis pada material dan meremehkan analisis pada aspek social.

Teori Peran Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah suatu struktur yang berbentuk formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah atau non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Menurut Duverger Organisasi Internasional adalah suatu bentuk dari hubungan internasional yang berbentuk kolektif atau struktur dasar dari suatu organisasi sosial yang dibentuk berdasarkan hukum atau tradisi manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi atau konvensi.

Menurut Clive Archer peranan organisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu: (Clive Archer, 2001 hal 35)

1. Sebagai instrument:
Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena:
Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen.
Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekerasan atau paksaan dari luar organisasi.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam proposal penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berupaya untuk menggambarkan Peran UNDP dalam menangani permasalahan kemiskinan di Bangladesh

Hasil Penelitian

Bangladesh merupakan sebuah negara yang berada di Kawasan Asia Selatan, yang menurut data dari World Bank, merupakan salah satu kawasan di dunia yang mengalami permasalahan kemiskinan struktural yang cukup serius selain Kawasan Amerika Selatan dan Afrika. Kemiskinan Struktural merupakan kemiskinan yang terjadi diakibatkan beberapa faktor, seperti kebijakan pemerintah, kondisi geografis dan lain sebagainya. Ciri-cirinya antara lain adalah lebih dari 50% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan serta terjadi perbedaan dalam pembangunan infrastruktur dalam berbagai daerah. Beberapa negara di Kawasan Asia Selatan, seperti Bangladesh, India, maupun Pakistan tercatat telah mengalami permasalahan kemiskinan semenjak tahun 1970an. Bahkan World Bank mencatat bahwa semenjak tahun 1975, Bangladesh merupakan negara yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Kawasan Asia Selatan.

Menurut data dari *World Bank* pada tahun 1975, tingkat kemiskinan di Bangladesh mencapai kisaran angka 80% atau sekitar 40 hingga 50 Juta jiwa, jauh berada di atas Pakistan pada tahun 1970 yang mencapai kisaran angka 50% ataupun India pada tahun 1976 yang berada di kisaran angka 60%. Tingginya angka kemiskinan Bangladesh pada tahun 1975 lebih dikarenakan Bangladesh masih berada pada masa transisi setelah kemerdekaannya pada tahun 1971. Setelah merdeka, Bangladesh menerapkan sistem Sosialis untuk mengatur politik maupun perekonomian negara Bangladesh. Keputusan ini kemudian menjadi sebuah kesalahan karena pemerintah Bangladesh masih tidak stabil dalam menjalankan pemerintahan maupun kebijakan ekonomi negaranya. Situasi menjadi semakin buruk bagi Bangladesh akibat bencana kelaparan pada tahun 1974. Menurut data dari *World Bank*, pertumbuhan perekonomian Bangladesh hanya mencapai rata-rata 2% hingga akhir tahun 1975. (www.economist.com/news/briefing/21565617-bangladesh-has-dysfunctional-politics-stunted-private-sector-yet-it-has-been-surprisingly diakses pada tanggal 23 April 2016)

Pada tahun 1975 Partai BNP berkuasa di Pemerintahan Bangladesh menggantikan Partai Awami. Beberapa perubahan besar dilakukan oleh Partai BNP demi mengembangkan perekonomian Bangladesh, diantaranya adalah mengembalikan sistem Pasar Bebas (*free market*) serta melepas beberapa perusahaan milik negara menjadi milik swasta. Semenjak tahun 1980an, dimana perekonomian Bangladesh saat itu tengah meningkat sebagai akibat dari meningkatnya industri pertanian mereka hingga tahun 2013 ketika UNDP menjalankan program kerja mereka untuk mengatasi kemiskinan di Bangladesh. Pada awal 1976 sampai dengan 1981, sektor pertanian Bangladesh yang menghasilkan banyak tanaman Rami, berkembang dengan pesat dan mencapai angka ekspor hingga 70% dari seluruh produk yang diekspor oleh Bangladesh pada tahun 1981. Akan tetapi pada pertengahan 1980, Industri Rami di Bangladesh mulai mengalami kemunduran akibat semakin maraknya produk yang berbahan dasar Polipropilena di seluruh dunia. Akibatnya perekonomian Bangladesh kembali mengalami hambatan hingga awal tahun 1990. (http://bnpbangladesh.com/backup_30-05-2016/en/index.php/history-of-bnp diakses pada tanggal 9 Agustus 2016)

Tidak stabilnya kondisi perekonomian Bangladesh pada tahun 1971 hingga tahun 1980an mengakibatkan angka kemiskinan Bangladesh turut menjadi tidak stabil. Pada tahun 1983 angka kemiskinan Bangladesh sempat mengalami penurunan hingga mencapai angka 60% atau sekitar 40-50 juta jiwa dari total 90 juta penduduknya, namun seiring dengan melemahnya ekspor Rami yang diandalkan oleh Bangladesh jumlah kemiskinan meningkat kembali menjadi 71,2% di tahun 1988. Peningkatan sektor industri, terutama industri tekstil membuat angka kemiskinan di Bangladesh terus menurun setiap tahunnya. Namun penurunan ini juga lebih dikarenakan semenjak tahun 1990, organisasi-organisasi internasional ataupun negara lain mulai masuk dan memberikan dana bantuan bagi Bangladesh. Contohnya adalah IMF yang memberikan bantuan senilai 400 Juta US\$ untuk program *Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)* pada tahun 1993, bantuan dari *World Bank* yang meminjamkan dana sebesar 500 Juta US\$ tanpa bunga kepada pemerintah Bangladesh pada tahun 1995, ataupun India yang

memberikan bantuan senilai 1 Triliun US\$ kepada Bangladesh demi menyaingi bantuan dari Cina agar Bangladesh tidak menjalin hubungan kerjasama yang terlalu dekat dengan Cina pada tahun 2000. Meski banyak mendapat bantuan, Pemerintah Bangladesh gagal menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara maksimal dan menyebabkan negara Bangladesh tidak dapat sepenuhnya terlepas dari permasalahan kemiskinan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Bangladesh begitu sulit untuk keluar dari permasalahan kemiskinan, dan selama faktor-faktor ini tidak dapat ditanganin dengan baik maka sangat sulit bagi Bangladesh untuk terlepas sepenuhnya dari kemiskinan. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah : Bangladesh merupakan sebuah negara dengan kondisi iklim yang tidak menentu yang diakibatkan oleh kondisi geografis negara Bangladesh itu sendiri. Wilayah Bangladesh atau setara dengan 57.000 km² berada pada ketinggian kurang dari 5 meter diatas permukaan laut. Dengan daerah seluas itu berada di bawah permukaan laut, Bangladesh menjadi salah satu negara yang paling rawan dalam mengalami bencana banjir. Tidak hanya memiliki banyak wilayah yang memiliki ketinggian rendah, Bangladesh juga menjadi jalur dari 3 sungai besar di kawasan Asia Selatan yakni Sungai Brahmaputra, Sungai Gangga dan Sungai Meghna. Ketiga sungai besar di Bangladesh seringkali meluap dengan berbagai macam akibat, seperti misalnya meluap akibat menerima limpahan es yang mencair dari Pegunungan Himalaya disebelah barat Bangladesh atau akibat pasang tahunan. Bencana banjir akhirnya seringkali menjadi bencana yang berakibat fatal bagi Bangladesh, dan menelan korban jiwa maupun material yang tidak sedikit jumlahnya.

Situasi Politik yang Tidak Kondusif Salah satu penyebab lain tingginya angka kemiskinan di Bangladesh adalah buruknya situasi politik maupun kinerja pemerintahan dalam menjalankan perekonomiannya. Di awal kemerdekaannya, Bangladesh menggunakan sistem ekonomi sosialis, yang tidak dapat berkembang dengan maksimal dan justru akhirnya menjadi salah satu alasan terjadinya kudeta oleh pihak militer pada tahun 1975. Semenjak saat itu, Bangladesh menggunakan sistem ekonomi pasar bebas. Akan tetapi, hasilnya pun tidak terlalu maksimal dikarenakan masih kerap terjadi gejolak di bidang politik Bangladesh bahkan hingga abad ke 20. Partai BNP didirikan oleh Ziaur Rahman yang kemudian menjabat sebagai Presiden dan menerapkan sistem pasar bebas di tahun 1975, dimana perusahaan-perusahaan milik pemerintah dijual kembali ke pihak swasta. Usaha ini mampu mengangkat perekonomian Bangladesh, meningkatkan GNI per capita Bangladesh yang sebelumnya hanya dikisaran angka 700US\$ menjadi 1086 US\$ di tahun 1980. Akan tetapi pemberontakan dari pihak militer kembali terjadi dan kembali menghambat usaha Bangladesh untuk berkembang. Semenjak 1981, kekuasaan Bangladesh dikuasai oleh pihak militer yang dipimpin oleh Muhammad Ershad yang memimpin secara diktator. Demi memperkuat industri tekstil Bangladesh yang saat itu tengah berkembang, Ershad menebang hutan-hutan di bagian barat Bangladesh. Kebijakan ini kembali berakibat buruk karena dengan tidak adanya hutan yang cukup, Bangladesh akan menjadi lebih rawan saat terjadi bencana banjir. Akhirnya pada tahun 1988 bencana banjir besar

kembali terjadi, menghancurkan 700.000 hektar pertanian yang menjadi tumpuan penduduk miskin Bangladesh. Angka kemiskinan pun kembali meningkat hingga mencapai 71% setelah pada tahun 1985 sempat menurun di angka 65%. Kebijakan pemerintah Bangladesh kembali menjadi penghambat pertumbuhan perekonomian Bangladesh sendiri. Memasuki abad ke 21, keadaan politik Bangladesh tidak kunjung membaik. Sistem politik Bangladesh menjadi sistem politik dua partai semenjak Presiden Ershad turun, dan dua partai utama menguasai pemerintahan Bangladesh adalah partai Awami dan partai BNP. Akan tetapi, kedua partai ini terlalu sering berselisih dan tidak dapat bekerja sama dengan baik. Selain perselisihan antara kedua partai utama, pemerintahan Bangladesh juga tidak maksimal perannya diakibatkan banyaknya terjadi praktik korupsi. Banyak praktik korupsi serta nepotisme di bidang politik, ekonomi, serta hukum di Bangladesh yang disebabkan oleh kemiskinan, lemahnya sistem administrasi serta tidak maksimalnya kinerja penegak hukum di Bangladesh. Situasi politik yang tidak menentu, kebijakan politik yang merugikan rakyatnya sendiri, serta praktik korupsi yang terus terjadi membuat Bangladesh tidak dapat menumbuhkan perekonomiannya secara maksimal dan membuat angka kemiskinan tidak dapat dikurangi secara signifikan.

Bangladesh adalah sebuah negara dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Pada tahun 1970, pertumbuhan penduduk Bangladesh mencapai 6,95%, lebih tinggi dibandingkan India (5,7%, tahun 1970) maupun Pakistan (6,6%, tahun 1970) yang merupakan negara tetangga Bangladesh yang juga mengalami permasalahan kemiskinan. Jumlah ini mampu ditekan hingga akhirnya pada tahun 2000, jumlah pertumbuhan penduduk di Bangladesh hanya mencapai 1,1%, lebih rendah di bawah India (3,12%, tahun 2000) dan Pakistan (4,47% tahun 2000). Akan tetapi populasi Bangladesh sudah mencapai angka yang tinggi, yakni mencapai angka 168.957.745 jiwa pada tahun 2010 atau setara dengan menyumbang 2,3% populasi dunia dan menjadi negara ke delapan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan luas wilayah yang hanya mencapai 143.998 km², kepadatan penduduk Bangladesh mencapai angka 1142/km persegi. Dari sekitar 160 juta jiwa Bangladesh, sebanyak 40% atau setara dengan sekitar 70 juta jiwa penduduk Bangladesh hidup di area pedesaan. Dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang tinggi, Bangladesh tidak memiliki fasilitas umum yang memadai untuk menunjang kebutuhan hidup penduduknya, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan, UNDP mencatat ada kurang lebih 14000 rumah sakit yang tersebar di seluruh Bangladesh, namun tercatat kurang dari 100 rumah sakit yang berada di daerah miskin seperti Chittangon dan daerah miskin lainnya. Jumlah dokter untuk menangani pasien pun tergolong minim, hanya sekitar 246 dokter untuk menangani 1 juta orang. Jumlah tersebut tidak mampu menangani dengan baik kesehatan penduduk Bangladesh. Selain bidang kesehatan, Bangladesh juga mengalami persoalan yang serupa di bidang pendidikan. Jumlah sekolah negeri

Bangladesh hanya 72 sekolah, dan ditambah dengan sekolah swasta yang berjumlah 99 sekolah. Rata-rata pendidikan yang ditempuh warga Bangladesh hanya 5 tahun, meskipun pemerintah Bangladesh menetapkan wajib belajar 10 tahun. Minimnya sekolah yang berkualitas, tingginya biaya hidup serta akses yang memadai untuk menempuh pendidikan membuat SDM Bangladesh menjadi tidak berkualitas saat mencapai usia produktif. Hanya 60% dari total 160 juta jiwa Bangladesh yang mampu membaca. Kondisi ini membuat banyak orang Bangladesh yang tinggal di daerah pedesaan menjadi tidak berpendidikan dan sulit untuk mengatasi permasalahan kemiskinannya. Tingginya angka kemiskinan di Bangladesh berdampak kepada rendahnya tingkat kesejahteraan Bangladesh. UNDP mencatat bahwa sebanyak 43% dari penduduk Bangladesh hanya memiliki tingkat pendapatan rumah tangga per hari sebesar \$1,25-\$2. Pendapatan rumah tangga yang berada di bawah standar UNDP ini memaksa anak-anak yang seharusnya bersekolah untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Menurut data Unicef di tahun 2015 menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan hingga 50% dari jumlah pekerja anak di tahun 2005, masih terdapat sekitar 3,2 juta anak-anak di Bangladesh yang berusia di bawah 14 tahun harus meninggalkan sekolahnya dan menjadi pekerja/buruh. Sebanyak 80% dari total anak-anak yang bekerja tersebut bekerja di daerah pedesaan seperti pertanian ataupun perikanan sementara sisanya menjadi buruh-buruh pabrik di kota terutama di industri garmen yang menjadi tumpuan ekspor Bangladesh. Tahun 2006, pemerintah Bangladesh menetapkan usia 14 tahun sebagai batasan usia untuk anak Bangladesh bekerja. Akan tetapi undang-undang tersebut tidak dapat berjalan maksimal karena sekitar 80% pekerja anak-anak tersebut bekerja di sektor informal sehingga sulit mendapat pengawasan dan perlindungan dari pemerintah Bangladesh. Ini mengakibatkan generasi SDM di Bangladesh menjadi tidak berkualitas akibat tidak menempuh pendidikan saat masih anak-anak dan sudah terbiasa untuk menjadi pekerja kasar/buruh. Kemiskinan di Bangladesh juga menyebabkan maraknya praktik Perdagangan Manusia atau *Human Trafficking*. Data dari UNHCR menyebutkan bahwa pada tahun 2010 sampai 2012 saja terdapat 31.766 korban praktik *Human Trafficking*, dimana lebih dari 70% dari jumlah tersebut merupakan wanita dan anak-anak di bawah umur. UNHCR menjelaskan bahwa setidaknya 300 anak-anak diperjual belikan setiap bulannya dari Bangladesh, dan diperkirakan sekitar 700.000- 4.000.000 anak-anak dan wanita asal Bangladesh juga menjadi korban *Human Trafficking* yang dikirim ke berbagai negara. Pemerintah Bangladesh mencoba mengatasi situasi ini, dengan memperketat undang-undang perlindungan anak maupun meningkatkan pengawasan. Pada Juni 2015 Pemerintah Bangladesh berhasil menyelamatkan 116 anak-anak yang diculik untuk diperjual belikan ke Dubai di Teluk Bengal.

Berdasarkan pada uraian data di atas, maka bisa dikatakan bahwa kemiskinan yang dialami oleh Bangladesh tergolong sebagai kemiskinan struktural. Zastrow menjelaskan bahwa kemiskinan struktural terjadi karena orang-orang/penduduk miskin di negara tersebut mengalami perlakuan/kebijakan yang salah dari pemerintah, yang membuat orang-orang miskin tersebut mengalami kesulitan untuk berkembang. Demi menangani permasalahan kemiskinan di negaranya, Pemerintah Bangladesh menjalankan berbagai macam program termasuk menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi kemanusiaan. Kondisi kemiskinan di Bangladesh juga menarik perhatian dari *United Nations Development Program* (UNDP), sebuah organisasi bentukan PBB pada tahun 1965 yang bekerja untuk mendukung perubahan dan meningkatkan negara-negara yang membutuhkan dengan memberikan pengetahuan, pengalaman dan sumber daya sebagai sarana untuk membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik. Semenjak itu UNDP aktif membantu Pemerintahan Bangladesh maupun organisasi-organisasi lokal untuk mendukung perkembangan Bangladesh. Bantuan yang diberikan berupa dana untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, maupun tenaga sukarelawan yang berkualitas untuk membantu perkembangan kesehatan maupun pendidikan di Bangladesh. Mulai tahun 1973 hingga 2000, juga ada 3 program kerja yang menjadi fokus utama UNDP, yakni membantu untuk menciptakan pemerintahan Bangladesh yang berdemokrasi, memperbaiki aspek HAM dan kesetaraan gender, serta memperbaiki lingkungan dan sumber energi di Bangladesh.

Seiring dengan berjalannya dan berkembangnya 8 MDGs di Bangladesh, pada tahun 2007 UNDP mulai menetapkan 3 program kerja utama untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Bangladesh. Ketiga program kerja ini dilaksanakan secara bertahap / tidak secara bersamaan, dan dimulai pada tahun yang berbeda beda pada rentang tahun 2007 hingga 2017. Ketiga program kerja tersebut adalah *Urban Partnerships for Poverty Reduction* (UPPR) yang dimulai pada tahun 2007 hingga tahun 2016. Lalu Program *National Social Protection Strategy* (NSPS) yang dimulai pada tahun 2011 hingga tahun 2017 serta Program *Support Sustainable and Inclusive Planning* (SSIP) yang dimulai pada tahun 2013 sampai 2016. Kendati demikian, Ketiga Program Kerja ini sama-sama bertujuan untuk mengatasi kemiskinan di Bangladesh. Dalam menjalankan Program Kerjanya, UNDP tidak bekerja sendirian. UNDP menjalin kerjasama dengan pemerintahan Bangladesh, menjalin kerjasama dengan Organisasi Kemanusiaan yang berasal dari lokal seperti *Bangladesh Agriculture Research Council* (BARC) maupun Organisasi yang berskala Internasional seperti UNDESA maupun AUSAID. Hal ini bertujuan agar Program Kerja UNDP bisa mendapat bantuan dana yang cukup serta pengawasan yang lebih baik dalam berjalannya ketiga Program Kerja UNDP.

***Peran UNDP dalam penganggulangan kemiskinan di Bangladesh
Urban Partnerships for Poverty Reduction (UPPR)***

Program UPPR adalah Program Kerja pertama yang dibentuk UNDP untuk menangani permasalahan kemiskinan Bangladesh. UPPR disetujui dan dijalankan dibawah pimpinan Ashekur Rahman dan Sandrine Capelle-Manuel (*UNDP Project Manager*), sasaran utama Program UPPR adalah mengurangi kemiskinan. Dimulai semenjak 01 November 2007, Program UPPR memiliki jangka waktu hingga akhir 2016. Diantara ketiga Program Kerja utama Bangladesh dalam mengatasi kemiskinan, Program UPPR merupakan Program kerja yang dinilai UNDP memiliki urgensi yang paling tinggi sehingga harus dilaksanakan lebih dulu dibandingkan dengan kedua Program Kerja lainnya. Sasaran utamanya adalah para penduduk Bangladesh yang mengalami kemiskinan demi mendorong mereka untuk memiliki taraf hidup yang lebih baik dengan cara menyediakan tempat tinggal/pemukiman yang layak dan memberikan pendidikan yang layak kepada penduduk Bangladesh.

Pada program kerja ini, UNDP mengajak beberapa organisasi maupun pemerintah Bangladesh untuk turut membantu jalannya program UPPR. UPPR memfokuskan pada perbaikan sarana umum, khususnya menyediakan tempat tinggal yang layak bagi warga miskin Bangladesh. Warga miskin Bangladesh, baik yang berasal dari kota maupun dari daerah pedesaan dipindahkan ke sebuah tempat khusus yang menampung mereka contohnya di Provinsi/Distrik seperti Khulna atau Dhaka. Di tempat-tempat ini, warga miskin Bangladesh diberikan pengetahuan, kemampuan maupun sumber daya yang mencukupi agar mereka mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan mengumpulkan warga miskin Bangladesh disatu tempat, program UPPR juga menargetkan agar terjalinnya komunikasi yang lebih baik antara warga-warga miskin serta mendukung untuk terciptanya pengertian akan kesetaraan gender

Beberapa hal yang sudah diraih/dicapai UNDP melalui program UPPR hingga 2013 antara lain adalah :

- a. Dimulai pada November 2007, sudah ada lebih dari 800.000 masyarakat Bangladesh yang bergabung dengan program UPPR ini dan dikumpulkan di beberapa wilayah khusus yang tersebar di berbagai Provinsi/Distrik seperti Khulna, Dhaka, dan lainnya. UNDP juga memilih wanita sebagai pemimpin dari komunitas/tempat penampungan masyarakat miskin yang dialokasikan di tempat tempat tersebut. Ini untuk mendukung akan pentingnya kesetaraan gender.
- b. Dijalankan semenjak bulan November 2007, UPPR menyediakan tempat penampungan masyarakat miskin yang dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang untuk mendukung warga miskin yang tinggal di penampungan, seperti misalnya akses untuk mendapatkan air bersih, listrik yang memadai, hingga jalan untuk mempermudah aktivitas mereka. Aktivitas ini terpusat di 23 kota miskin Bangladesh, seperti contohnya Rajtahi, Khulna, Sirajganj, Gazipur, dan lain sebagainya.

- c. Pembentukan Program *Ganonkendra* pada tahun 2007 di Dhaka. Program ini mendorong masyarakat miskin di Bangladesh untuk lebih memahami permasalahan atau isu-isu sosial yang menyebabkan kemiskinan seperti kesetaraan gender, pernikahan usia dini dan lain sebagainya. *Ganonkendra* juga mendirikan lembaga pendidikan informal seperti di Penampungan orang miskin di Khulna dan Rajtahi dengan mendatangkan guru-guru yang layak dengan harapan agar anak-anak miskin Bangladesh memiliki pendidikan yang mencukupi untuk bersaing di dunia pekerjaan. Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi kaum perempuan dengan cara menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan-perusahaan/lembaga-lembaga pekerjaan di Bangladesh untuk dapat memberikan bantuan dalam penyuluhan kemampuan bekerja serta penyediaan lapangan kerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Contohnya adalah Program UPPR menjalin kerjasama dengan Lembaga Sosial bernama Grameen Bank sejak 2009 yang mampu membuka lapangan kerja bagi kaum perempuan Bangladesh bahkan melayani kaum perempuan dalam peminjaman uang

Sejauh ini sudah ada 23 kota yang menjadi pusat-pusat kegiatan UPPR dan UPPR mampu memperbaiki sekitar 1 juta jiwa penduduk Bangladesh yang terjebak kemiskinan, membantu perkembangan kehidupan sosial dengan membangun jalan sepanjang 843km serta mampu berperan aktif dalam meningkatkan debit air bersih di daerah Khulna, yang sebelumnya berada pada 11.474 liter menjadi 246.891 liter. UPPR mampu menekan angka kemiskinan di Bangladesh hingga turun sebanyak 12%, dari sekitar 59% dari jumlah total penduduknya di tahun 2007 menjadi 48% di tahun 2013. Diharapkan saat memasuki tahun 2015 UPPR mampu memberikan hasil yang lebih signifikan dalam membantu mengurangi angka kemiskinan di Bangladesh. ([http:// www. bd. undp. Org /content/bangladesh/en/home/operations/projects/All_Closed_Projects/Closed_Pr ojects_Poverty_Reduction/urban-partnerships-for-poverty-reduction--uppr-.html#](http://www.bd.undp.org/content/bangladesh/en/home/operations/projects/All_Closed_Projects/Closed_Projects_Poverty_Reduction/urban-partnerships-for-poverty-reduction--uppr-.html#) diakses pada 18 September 2016)

National Social Protection Strategy (NSPS)

Program kerja NSPS berawal pada 1 August 2011, dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2017. Sasaran utama Program NSPS adalah mendorong organisasi internasional agar memberikan bantuan dana untuk membantu Bangladesh dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Selain itu, NSPS juga menyediakan tenaga ahli untuk menjalankan strategi/kebijakan pemerintah Bangladesh dalam menangani kemiskinan. Melalui program kerja NSPS, UNDP juga melakukan penelitian dan analisa untuk melihat peluang bisnis maupun sektor-sektor yang mungkin bisa menjadi potensi bisnis maupun sektor-sektor yang bisa membahayakan perkembangan perekonomian Bangladesh. Program NSPS disetujui dan dijalankan dibawah pimpinan Monirul Islam dan Majeda Haq (UNDP Project Manager). Program kerja NSPS merupakan program kerja yang sangat penting bagi Bangladesh. Melalui NSPS, UNDP dapat mencari dana untuk menjalankan program kerja maupun aktivitas dari program kerja tersebut untuk menangani permasalahan kemiskinan di Bangladesh. Selain itu keaktifan UNDP

dalam meminta dukungan dana/bantuan dari berbagai Organisasi Internasional maupun Negara-negara lainnya dapat membantu Pemerintah Bangladesh dalam meningkatkan cadangan devisa negaranya. Hasilnya bisa dilihat saat tahun 2013, dimana Program NSPS mampu meningkatkan cadangan devisa negara sebesar 2% dari total 150 juta US\$ yang merupakan GDP nasional Bangladesh atau sebesar 3 juta US\$. Sebagai perbandingannya pada tahun 2007 cadangan devisa negara hanya stabil pada angka 1% dari GDP nasional Bangladesh. Cadangan devisa negara ini kemudian akan digunakan sebagian untuk mendorong Program Kerja lainnya.

Support Sustainable and Inclusive Planning (SSIP)

Program SSIP disetujui dan dijalankan dibawah pimpinan Fakrul Ahsan (UNDP Project Manager). Program kerja SSIP dijalankan pada 1 Juni 2013, dan memiliki jangka waktu hingga 31 Desember 2016. Sasaran utama SSIP adalah Pemerintahan Bangladesh, karena UNDP berpendapat bahwa kinerja Pemerintahan Bangladesh harus diperbaiki, salah satunya dengan cara diberikan data maupun informasi yang menunjang Pemerintahan Bangladesh. Tujuan utama dari program SSIP ini adalah untuk memperbaiki kendala-kendala teknis yang menghalangi ataupun menghambat Pemerintah Bangladesh dalam menangani permasalahan kemiskinan di negaranya. Program SSIP dimulai pada tahun 2013 dikarenakan UNDP ingin memastikan kedua Program Kerja lainnya yakni Urban Partnerships for Poverty Reduction serta National Social Protection Strategy untuk bergerak terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan SSIP merupakan Program yang mendorong kebijakan Pemerintahan Bangladesh untuk melindungi dan mengembangkan hasil dari kedua Program Kerja lainnya.

Beberapa kegiatan Program Kerja SSIP adalah membantu Pemerintahan Bangladesh dalam merumuskan undang-undang perlindungan untuk pekerja anak di bawah umur pada tahun 2006, yang merupakan usulan dari UNDP untuk melindungi anak-anak miskin di bawah umur. Selain itu, UNDP juga membantu menyediakan data/informasi tentang kemiskinan yang terjadi di Bangladesh, misalnya pada area mana kemiskinan itu terfokus serta data-data penunjang lainnya. Setelah itu UNDP akan berdiskusi dengan pemerintah Bangladesh untuk membantu mereka menemukan solusi yang tepat untuk menanganinya. Selain itu, Program SSIP juga berhasil membantu Pemerintah Bangladesh untuk menyusun laporan MDGs negaranya ke UNDP pusat setiap tahunnya. Isu – isu yang diutamakan oleh Bangladesh adalah kesetaraan gender dan child labour. Peran UNDP dalam Program Kerja SSIP adalah menganalisis data dan membantu Pemerintahan Bangladesh untuk menyusun laporan berkala kepada UNDP pusat agar Progress Bangladesh dalam mengatasi kemiskinan di negaranya dapat dipantau baik oleh UNDP pusat maupun para investor/mitra bisnis Bangladesh. Dalam perkembangannya, laporan MDGs Bangladesh mendapat pujian dan penghargaan dari UNDP pusat pada tahun 2013 dan 2014, sehingga menjadikan Bangladesh sebagai contoh bagi negara – negara lain yang mencoba meraih MDGs. Untuk menjalankan program ini, UNDP juga menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi lainnya seperti UNDESA, *General Economics Division*

(GED), *Ministry of Finance (MoF)*, *Bangladesh Bank (BB)*, *Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)*, terutama sebagai sponsor/pendukung dana. setelah UNDP menjalankan program kerja *Support Sustainable and Inclusive Planning (SSIP)*, *Urban Partnerships for Poverty Reduction* dan *National Social Protection Strategy*, angka kemiskinan di Bangladesh dapat ditekan dengan lebih baik. Pada tahun 2006, angka kemiskinan Bangladesh masih berada di kisaran 40%-50%. Namun pada 2013, angka kemiskinan di Bangladesh mampu ditekan menjadi 31% atau setara dengan sekitar 50-60 juta penduduk jiwa. GDP per kapita Bangladesh yang berada di kisaran 1700US\$ di tahun 2006 meningkat menjadi 2135 US\$ di tahun 2010. GNI per kapita Bangladesh di tahun 2006 yang berada pada 1600 US\$ menjadi 2330 US\$ di tahun 2010. Meskipun jumlah tersebut masih berada di bawah standar UNDP, namun Bangladesh menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan negara-negara lain yang juga menjalankan MDGs UNDP seperti India maupun Pakistan. Keberhasilan Bangladesh untuk memperbaiki dan menangani permasalahan kemiskinan di negaranya tidak lepas dari bantuan UNDP yang berperan aktif. (<http://www.bd.undp.org/content/dam/bangladesh/docs/Publications/Pub2016/UPPR%20Report%202016.pdf?download>. diakses pada tanggal 05 April 2017)

Ketiga program kerja yang dibentuk UNDP untuk menangani kemiskinan di Bangladesh memiliki beberapa faktor pendukung maupun penghambat. Dengan memiliki Program Kerja yang jelas, investor maupun NGO lainnya akan lebih tertarik untuk berperan serta baik dalam masalah dana maupun tenaga kerja. Hal ini bisa mendorong perubahan/dampak secara instan dalam permasalahan kemiskinan di Bangladesh. Dukungan juga diberikan oleh masyarakat miskin di Bangladesh. Hal ini bisa dibuktikan dari banyaknya masyarakat miskin di Bangladesh yang turut serta dalam ketiga program kerja UNDP untuk mengatasi kemiskinan, terutama Program Kerja UPPR.

Kerjasama UNDP antar Organisasi Internasional Australian Agency For International Development (AUSAID)

Bantuan Australia membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mendukung generasi penerus Bangladesh untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Pada 2015-16, total ODA Australia ke Bangladesh sekitar \$ 59.8m (\$ 42,1 juta untuk bantuan bilateral), menjadikannya program negara terbesar kesebelas. ODA Australia mendukung inisiatif untuk memungkinkan Bangladesh mencapai tujuan pembangunan dengan fokus khusus pada pendidikan dan membangun ketahanan ekonomi di antara masyarakat termiskin dan paling terpinggirkan. Di kedua wilayah tersebut, memprioritaskan kesetaraan gender dengan berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.

Khususnya program Australia-Bangladesh difokuskan pada investasi dalam pengembangan, keterampilan dan produktivitas manusia. Dua tujuan AUSAID adalah:

- a. Meningkatkan akses pendidikan, kesetaraan, efisiensi dan hasil belajar.

- b. Membangun ketahanan dengan mengurangi kerentanan dan meningkatkan inklusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Australia juga memberikan 23 Australian Awards pada tahun 2016, yang terdiri dari 22 penghargaan jangka panjang dan 1 penghargaan jangka pendek ke Bangladesh untuk studi di bidang prioritas kebijakan sosial dan ekonomi. Dukungan Australia ke Bangladesh sejalan dengan visi Pemerintah Bangladesh untuk negara tersebut, yang diuraikan dalam Rencana Lima Tahun Ketujuh 2016-2020, di mana Pemerintah Bangladesh telah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberdayakan warga negara sebagai bagian dari visi jangka panjang Pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan.

National Adaptation Plan Global Support Programme (NAP-GSP)

Program Dukungan Global Plan Adaptasi Nasional (NAP-GSP) adalah program Program PBB untuk Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), yang didanai oleh Least Developed Countries Fund (LDCF). NAP-GSP membantu negara-negara berkembang yang kurang berkembang (LDL) untuk memajukan Rencana Adaptasi Nasional (NAP). NAP akan membawa fokus dan koordinasi yang lebih besar untuk upaya-upaya yang dipimpin oleh negara dalam manajemen bencana dan pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim. NAP akan menambah paket strategis dari rencana sektoral lainnya dan kebijakan untuk negara-negara yang membantu memandu mekanisme sumber daya pengembangan internal dan juga yang disediakan oleh donor.

Status NAP-GSP di Bangladesh:

- a. NAP-GSP menanggapi permintaan resmi untuk mendapat dukungan dari Pemerintah.
- b. Tuan Quamrul Chowdhury bertemu dengan tim NAP-GSP selama COP19. Bantuan diminta di 2 front

Memfasilitasi diskusi antar kementerian / lintas sektoral untuk.

- a. Sensitisasi pejabat Bangladesh dalam proses NAP
- b. Buat rencana tindakan tentang bagaimana mereka ingin memajukan proses NAP mereka (termasuk penyusunan TOR untuk proses ini dan untuk anggota tim nasional yang akan melakukan upaya ini.
- c. NAP-GSP berkoordinasi erat dengan Kantor Negara Bagian UNDP Bangladesh, yang mengelola hibah sebesar US \$ 40.000 dari Pemerintah Norwegia untuk memulai sebuah peta jalan untuk RAN. Inisiatif konsultatif nasional untuk mengembangkan Peta Jalan NAP saat ini sedang berlangsung.

Namun terdapat hambatan bagi UNDP untuk bisa mengatasi kemiskinan di Bangladesh dengan maksimal. UNDP membutuhkan peran yang aktif dan responsif dari Pemerintah Bangladesh untuk membantu berjalannya Program Kerja UNDP dan membuatnya untuk menjadi dasar bagi perkembangan Bangladesh. Karena hanya Pemerintah Bangladesh yang dapat menjangkau rakyatnya secara menyeluruh dan memahami akan setiap keperluan/kebutuhan masyarakatnya. Akan tetapi situasi Pemerintahan Bangladesh seringkali tidak kondusif dan dipenuhi kepentingan politik, sehingga minimnya peran Pemerintah

Bangladesh justru menjadi hambatan dalam usaha UNDP untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Bangladesh.

Kesimpulan

Kondisi kemiskinan Bangladesh mendapatkan perhatian dari dunia internasional, salah satunya adalah UNDP. UNDP masuk ke Bangladesh semenjak tahun 1972 dan mulai memperbaiki berbagai aspek politik maupun perekonomian Bangladesh. Di tahun 2007, Bangladesh 3 program kerja utama untuk menangani kemiskinan yakni *Support Sustainable and Inclusive Planning (SSIP)*, *Urban Partnerships for Poverty Reduction* dan *National Social Protection Strategy*. Ketiga Program Kerja ini bergerak dengan memperbaiki fasilitas umum masyarakat Bangladesh, mendorong kinerja Pemerintah Bangladesh dalam menangani kemiskinan, bahkan hingga mencari investor/NGO lain untuk mendorong perkembangan perekonomian Bangladesh. Selain dengan ketiga programnya sendiri, UNDP juga bekerjasama dengan Organisasi Internasional lainnya salah satunya adalah *Australian Agency For International Development (AUSAID)* dan *National Adaptation Plan Global Support Programme (NAP-GSP)* Dengan membuat program kerja yang lebih terfokus untuk menangani kemiskinan, UNDP mampu membantu Pemerintah Bangladesh dalam mengatasi kemiskinan di negaranya. Tidak hanya menitikberatkan kepada pembangunan infrastruktur ataupun bantuan secara finansial, namun UNDP juga lebih memperhatikan permasalahan sosial yang menyebabkan kemiskinan di Bangladesh, seperti mendorong kesetaraan gender dan mencegah kegiatan Child's Labour di Bangladesh.

Daftar Pustaka

Buku

Archer, Clive. 2001. *International Organization*. London. Psychology Press.

Haughton, Jonathan dan Kandker, Shaidur R. 2009. *Handbook of Poverty and Inequality*. Washington DC. World Bank.

Media Internet

Bangladesh National Party. Lihat pada [http:// bnp bangladesh. Com / backup _30-05-2016 /en /index.php/history-of-bnp](http://bnp.bangladesh.com/backup_30-05-2016/en/index.php/history-of-bnp) (diakses pada tanggal 9 Agustus 2016)

Bangladesh Awami League. Lihat pada <http://www.albd.org/index.php/en/party/history> (diakses pada tanggal 9 Agustus 2016)

Charles Enou. *Role Of Ngos In Rural Poverty Eradication: A Bangladesh Observation*. Lihat pada http://www.academia.edu/9167907/ROLE_OF_NGOS_IN_RURAL_POVERTY_ERADICATION_A_BANGLADESH_OBSERVATION (diakses pada tanggal 12 Agustus 2016)

Suwendu Biswas. *Human Trafficking In Bangladesh: An Overview*. Lihat pada <http://fairbd.net/human-trafficking-in-bangladesh-an-overview/> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2016)

The Economist. *Bangladesh and development The path through the fields*. Lihat pada <http://www.economist.com/news/briefing/21565617-bangladesh-has-dysfunctional-politics-stunted-private-sector-yet-it-has-been-surprisingly> (diakses pada tanggal 23 April 2016)

UNDP. Lihat pada <http://www.bd.undp.org/content/dam/bangladesh/docs/Publications/Pub2016/UPPR%20Report%202016.pdf?download>. (diakses pada tanggal 05 April 2017)

UNDP. *Urban Partnership for Poverty Reduction*. Lihat pada http://www.bd.undp.org/content/bangladesh/en/home/operations/projects/All_Closed_Projects/Closed_Projects_Poverty_Reduction/urban-partnerships-for-poverty-reduction--uppr-.html# (diakses pada 18 September 2016)